

Abstrak

Dalam mewujudkan *good government governance* pemerintah terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan kata lain ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Selain melalui perbaikan kinerja, sebagai langkah awal pemerintah juga melakukan implementasi sistem informasi akuntansi yang adil, transparan dan akuntabel. Lembaga Pemerintah sebenarnya bebas untuk merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang dibutuhkan nantinya akan disajikan kepada pihak-pihak di dalam dan di luar, maka prosedur-prosedur tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang telah dibuat. Hampir seluruh lembaga pemerintahan telah mengimplementasikan sistem informasi akuntansi (SIA). Tetapi pada realita sebenarnya, sistem informasi akuntansi sering tidak dilaksanakan secara maksimal sehingga menimbulkan kerugian bagi para pemegang kepentingan. Oleh sebab itu dibutuhkan tinjauan untuk mengetahui kelemahan tersebut. Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi pada setiap proses bisnisnya termasuk pada siklus pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran pada Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok sudah berjalan dengan baik akan tetapi terdapat beberapa kelemahan pada sistem pengendalian belanja. Kelemahan tersebut menyebabkan adanya temuan BPK dalam ringkasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2020 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2019 Ruang Lingkup Komisi V.

Kata Kunci: *Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Pengeluaran, Sistem Pengendalian Belanja, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok.*

Abstract

In realizing good government governance, the government continues to strive to provide good services to the community in other words displayed in the achievement of performance as the commitment has been set. In addition to improving performance, as a first step the government also implements a fair, transparent and accountable accounting information system. Government agencies are actually free to design and implement various procedures that are expected to produce the information needed. However, because the information needed will be presented to parties inside and outside, the procedures have been regulated in the regulations that have been made. Almost all government agencies have implemented accounting information systems (SIA). But in reality, accounting information systems are often not implemented optimally, causing losses for stakeholders. Therefore, a review is needed to find out the weaknesses. Tanjung Priok Class I Navigation District is a Technical Implementation Unit (UPT) of the Directorate General of Marine Transportation that has implemented accounting information systems in every business process including the expenditure cycle. The results showed that the implementation of the expenditure cycle accounting information system in the Tanjung Priok Class I Navigation District has been going well but there are some weaknesses in the shopping control system. The weakness led to the findings of the CPC in the summary of the results of the BPK RI examination semester I in 2020 on the Financial Statements of the Ministry / Institutions & Other Agencies FY 2019 Scope of Commission V.

Keywords: Accounting Information System, Spending Cycle, Shopping Control System, Tanjung Priok Class I Navigation District.